

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dan pembangunan negara saat ini mulai mengencangkan agenda kesetaraan gender. Berbagai organisasi internasional mengedepankan kebijakan yang berusaha untuk menutup kesenjangan gender di berbagai aspek kehidupan. Seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang menetapkan target kesetaraan gender pada nomor 5 dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dengan fokus tujuannya yaitu penghapusan diskriminasi, kekerasan, menjamin kesetaraan hak, dan menjamin akses universal kesehatan reproduksi bagi perempuan. Atau Amnesty Internasional, suatu organisasi internasional bidang hak asasi kemanusiaan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan, mengadvokasi, dan menyerukan implementasi hukum yang menjamin keadilan bagi perempuan korban kekerasan, serta menghapus hukum yang mendiskriminasi perempuan.

Adapun tujuan dunia yang tidak mendiskriminasi seseorang atas dasar gender terwujud, dibutuhkan kontribusi dari berbagai aktor di lingkup internasional. Negara-negara dari seluruh dunia didorong untuk mengupas problematika serta menerapkan solusi kesenjangan gender di negara mereka masing-masing. Bagi negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi, ada tekanan internasional untuk menjadi teladan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Menurut laporan Global Gender Gap Report 2022 oleh World Economic Forum, negara maju dengan pendapatan tinggi per kapita

sudah menutup setidaknya 80% dari kesenjangan gender di negara tersebut, seperti Islandia dengan persentase 90,8% menuju kesetaraan gender yang menjadikannya menduduki peringkat teratas, Finlandia (86%) menyusul di peringkat kedua, Swedia (82,2%) peringkat kelima, Jerman (80,1%) kesepuluh, dan Perancis (79,1%) pada peringkat kelimabelas. Di antara negara- negara maju dengan pendapatan tertinggi di dunia ini, Jepang menjadi pengecualian. Dari total 145 negara, tingkat kesetaraan gender Jepang (65%) terletak pada peringkat 116 menempatkan Jepang lebih rendah dari negara berkembang dengan pendapatan rendah seperti Mozambik (75,2%) yang menempati peringkat 34. Meskipun Jepang telah memenuhi skor kesenjangan gender pada partisipasi pendidikan, kesenjangan kesempatan dan partisipasi di bidang ekonomi bertengger di peringkat 121 dengan persentase 56,4% dan pemberdayaan politik dengan peringkat yang lebih rendah, yaitu 139 dari 145 negara dengan persentase 6%. Melihat betapa luasnya jarak kesetaraan gender di Jepang di antara negara-negara dengan ekonomi maju menjadikan Jepang seperti sebuah anomali.

Pada tahun 2013, mantan perdana menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan *Womenomics* yang dinyatakan oleh Abe akan membuat perempuan di Jepang bersinar (*women that shines*). Kebijakan ini merupakan bagian dari set kebijakan *Abenomics* yang berisi tujuan dan strategi untuk membuat perekonomian lebih terdepan. Janji Abe untuk membuat perempuan Jepang “bersinar” dinanti-nantikan dapat membuahkan perubahan bagi hak-hak perempuan. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan kritis bermunculan mengenai

kebijakan ini. Bagaimana dan dengan cara apa perempuan ‘bersinar’ yang dimaksud Abe?

Shinzo Abe memiliki beberapa target ambisius dalam kebijakan Womenomics. Target-target yang ingin dicapai Womenomics ialah: meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja perempuan, normalisasi “kurva-M” dengan menaikkan persentase perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan anak pertama mereka, menargetkan peningkatan perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di seluruh masyarakat Jepang, memperluas kapasitas penitipan anak dengan tujuan menghapuskan daftar tunggu penitipan anak, dan meningkatkan persentase ayah yang mengambil cuti ayah.

Pernyataan Shinzo Abe mengenai optimisme Kebijakan Womenomics disampaikan pada pidatonya di Majelis Umum PBB Ke- 68 tahun 2013 menggarisbawahi betapa pentingnya bagi pemerintah Jepang untuk membuat tempat kerja yang nyaman dan mendukung potensi perempuan untuk bias bersinar dengan menggunakan strategi Womenomics.

*“Creating an environment in which women find it comfortable to work and enhancing opportunities for women to work and to be active in society is no longer a matter of choice for Japan. It is instead a matter of the greatest urgency.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> (Akihiko, 2013)

Jika dinilai dari kebijakan-kebijakan yang dibentuk, dapat dilihat bahwa Abe memprioritaskan keterlibatan perempuan di lingkungan kerja dan akomodasi bagi pekerja. Meskipun selama masa jabatan Shinzo Abe peringkat Gender Gap Index (GGI) Jepang meningkat dari peringkat 105 (64%) di tahun 2013 menjadi peringkat 110 (68%) di tahun 2018, di masa akhir jabatannya, peringkat Jepang menurun lagi. Angka GGI Jepang di tahun 2020 tidak dapat mencapai rata-rata GGI dunia 69%, angka yang diraih hanya 65%. Data tersebut menunjukkan perkembangan kesetaraan gender di Jepang yang lambat.

Alih-alih mengalami progres peningkatan, Kebijakan Womenomics justru mengalami kemunduran target. Salah satu target Womenomics, yaitu 30% perempuan dalam posisi kepemimpinan, namun target ini diundur 10 tahun ke depan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020, Jepang tidak mencapai separuh dari hasil yang diharapkan, rasio saat ini adalah 8,9% saja.<sup>2</sup>

Kritik mengenai kebijakan Womenomics pun datang dari berbagai pihak, misalnya: media massa, pegiat feminis, organisasi internasional dan akademisi. Tujuan untuk membuat perempuan bersinar yang digaungkan oleh Abe dipandang skeptis. Kebijakan Womenomics dipandang oleh Schieder (2014) sebagai alat menaikkan profit, penyokong ekonomi nasional dan prestise negara, alih-alih mendukung perempuan sebagai individu.

Pada Majelis Umum PBB ke-26 2013, Abe mengungkapkan dalam

---

<sup>2</sup> (The Asahi Shimbun, 2020)

pidatonya bahwa ia mendukung partisipasi perempuan yang lebih banyak di bidang ekonomi dan cuti keluarga agar para perempuan dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Mengingat kembali bahwa niat yang mendasari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi, editor jurnal perempuan berbasis Tokyo Tokiko Kashiwara memandang bahwa apa yang ingin Abe lakukan adalah menggunakan perempuan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi negara, dengan cara perempuan melahirkan dan membesarkan anak, sesuai dengan peran tradisional perempuan Jepang (Anthony Kuhn, 2013).

Adapun Womenomics juga dipandang sebagai kebijakan yang reaksional. Menurut Hasunuma (2017), kebijakan Womenomics merupakan sebuah respon dari tekanan internasional yang memberikan kritik tajam terhadap perkembangan Jepang menuju kesetaraan gender. Kritik tajam terhadap Jepang ini disampaikan melalui sorot media internasional, catatan perkembangan kebijakan menangani isu gender oleh lembaga internasional seperti OECD, World Economic Forum, dan IMF.

Salah satu kritik media tentang kebijakan Womenomics yang telah berjalan semenjak 2013 ini datang dari Jurnalis Forbes William Pesek yang menulis bahwa Abe selalu menyempatkan diri hadir dalam konferensi yang disponsori oleh kelompok advokasi gender untuk menyampaikan poin-poin pembicaraannya namun selama masa jabatannya Jepang turun 19 peringkat dalam indeks kesenjangan gender Forum Ekonomi Dunia.

Melihat dari kemampuan Jepang untuk mencapai angka GGI yang

memuaskan melalui penerapan kebijakan Womenomics, harapan bagi Jepang untuk menjadi negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender masih nampak redup.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, *mengapa kebijakan Womenomics Shinzo Abe mengalami kegagalan?*

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kegagalan kebijakan Womenomics Shinzo Abe.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian mengenai kegagalan kebijakan Womenomics Shinzo Abe:

1. Peneliti berharap penelitian ini akan membawakan wawasan baru dalam studi gender negara Jepang.
2. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat digunakan dalam memecahkan dan atau merundingkan solusi bagi isu-isu gender yang terjadi di masyarakat.
3. Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa studi peneliti sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro.

## 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1. Tinjauan Pustaka

Kebijakan *womenomics* merupakan bagian dari satu set kebijakan *Abenomics* yang memiliki 3 panah utama, yaitu: kebijakan moneter ekspansif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Panah ketiga adalah panah yang menjadi lingkup kebijakan *womenomics*. Menurut jurnal berjudul “*Womenomics Sebagai Mekanisme Peningkatan Peran Perempuan Di Jepang: Studi Kasus Kebijakan Pro-Gender Di Era Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2*” oleh Saputra (2016), *Womenomics* sebagai sebuah kebijakan dilihat sebagai suatu langkah positif bagi peningkatan peran perempuan di Jepang. Sebagai bagian dari kebijakan *Womenomics*, Saputra menilai bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan Shinzo Abe ini membawa perubahan pada struktur pengaturan posisi dan pandangan-pandangan yang mengesampingkan perempuan dalam dunia kerja. Lebih lanjut, panah ketiga yang menjadi payung bagi *Womenomics* dalam kebijakan *Abenomics*, reformasi struktural, diartikan bahwa *Womenomics* berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi Jepang. Kebijakan *Womenomics* menurut Saputra, merupakan manifesto dalam transformasi peranan perempuan dan perbaikan sistem lingkungan kerja. Meskipun begitu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Saputra adalah, penelitian Saputra tidak menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dialami perempuan di lingkup kerja.

Jika Saputra menilai *Womenomics* sebagai kebijakan yang optimistik, Hisako Motoyama (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Has*

***Japanese Foreign Policy Become Feminist Too? An Analysis of the “Women Shine” Foreign Policy of the Second Abe Administration***

berargumen bahwa Womenomics merupakan kebijakan “pro-gender” yang menjadi alat tambahan untuk Shinzo Abe mewujudkan ambisi perkembangan ekonomi Abenomics-nya. Menurut Motoyama, Womenomics adalah strategi Shinzo Abe untuk memparadekan wajah baru Jepang, dalam upaya memperbaiki citra Jepang di panggung internasional yang terlambat dalam hal kesetaraan gender. Motoyama mengartikan upaya Abe yang aktif mengangkat isu-isu perempuan internasional sebagai bagian dari strategi keamanan untuk memperkuat hubungan militer dengan Amerika Serikat (AS). Untuk diakui sebagai sekutu yang berharga oleh AS sekaligus pemenuhan syarat untuk mengklaim status anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DKPBB), Jepang harus menyusun kembali citra maskulinnya yang tidak dicapai tidak hanya melalui kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan militer. Meskipun begitu, dalam penelitian ini, Motoyama tidak menjelaskan mengenai bagaimana stereotip gender di area politik mempengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh negara.

Bertentangan dengan gagasan yang diajukan Saputra, dalam Jurnal “Meiji Journal of Political Science and Economics” yang berjudul ***“Womenomics vs. Women: Neoliberal Cooptation of Feminism in Japan,”*** Schieder (2014) berpandangan bahwa fokus politik kebijakan Womenomics ini lebih dekat dengan ekonomi nasional dan pasar bebas daripada nasib kehidupan sebagian besar wanita pekerja di Jepang. Sementara argumen peningkatan ekonomi akibat keterlibatan lebih banyak

perempuan dalam dunia kerja diserukan oleh pemerintah, hal ini justru menjauhkan perhatian politik dari kondisi kehidupan dan mata pencaharian dan tanggungan yang dihadapi perempuan. Schieder berargumen bahwa upaya Abe yang mempromosikan kebijakan ini sebagai sebuah advokasi terhadap kesetaraan gender sebenarnya merupakan bentuk baru untuk memperkuat pasar bebas. Kesamaan penelitian Schieder dan penelitian ini ialah, realita kehidupan perempuan di Jepang masih masih terhambat oleh berbagai problematika yang tidak dicakup dalam kebijakan Womenomics

Lalu, salah satu jurnal yang juga membahas Womenomics, yaitu jurnal berjudul "*Was Abe Shinzo's womenomics policy good for women or the economy?*" oleh Emma Dalton (2017) menyampaikan pandangan yang serupa dengan Schieder. Menurut Dalton, target-target yang ditentukan dalam kebijakan Womenomics bersifat elitis dan tidak sesuai dengan sebagian besar keadaan pekerja perempuan di Jepang. Perempuan dipaksa untuk mengambil pekerjaan tetap penuh waktu dengan kondisi bekerja yang sama dengan laki-laki, atau mengambil pekerjaan tidak tetap, paruh waktu atau serabutan dengan jam kerja yang lebih fleksibel namun lebih rentan kondisi kerja dan stabilitas ekonominya. Manfaat yang ditawarkan oleh kebijakan Womenomics ditujukan kepada "*ordinary workers*" yang direferensikan kepada perempuan-perempuan dengan pekerjaan tetap dan dijamin keamanan finansialnya. Sementara pekerja paruh waktu, serabutan, bahkan *single mom* tidak termasuk kategori yang mendapatkan benefit dari kebijakan Womenomics. Dalton memandang fakta bahwa sebagian besar

perempuan di Jepang mengalami konflik internal untuk meraih 'karir' tidak mencerminkan kecukupan dari pendekatan yang digunakan Shinzo Abe dalam kebijakan Womenomics. Dalton melihat bahwa selama Jepang masih melanggengkan budaya kerja dengan jam kerja lama dan kondisi lapangan kerja yang tidak mengakomodasi *work-life balance*, Womenomics hanya akan berpengaruh untuk sebagian kecil perempuan di Jepang. Kesamaan penelitian Dalton dengan penelitian ini adalah menyoroti tentang budaya kerja di Jepang yang menghalangi terpenuhinya *work-life balance* untuk perempuan.

Berdasarkan literatur-literatur berkenaan dengan kebijakan Womenomics, argumen yang menonjol adalah kebijakan Womenomics ini ditujukan untuk meraih benefit ekonomi saja seperti yang telah diungkapkan oleh Schieder sebelumnya. Ayako Kano (2018) menambahkan dalam jurnal berjudul, "***Womenomics and Acrobatics: Why Japanese Feminists Remain Skeptical about Feminist State Policy***" alih-alih didorong oleh keinginan memperbaiki kesenjangan gender, Womenomics dibuat karena dorongan krisis demografi yang melanda Jepang. Dengan kebijakan yang memperpanjang cuti mengasuh anak bagi pekerja perempuan, hal ini mendorong perempuan untuk menjadi pengasuh anak penuh waktu, namun dibiarkan menghadapi dilema sebagai perempuan yang mengasuh anak sekaligus berkeinginan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Meskipun begitu, Kano kurang mengeksplorasi bagaimana peran ekspektasi budaya dapat mempengaruhi kompleksitas *work-life balance* pekerja di

Jepang. Argumen tersebut dapat disokong oleh karya tulisan Macnaughtan (2015) dalam jurnalnya yang berjudul, “*Womenomics for Japan: is the Abe policy for gendered employment viable in an era of precarity?*” ia menjelaskan bagaimana kondisi dunia kerja di Jepang yang menganut sistem laki-laki sebagai *breadwinner* dan perempuan sebagai ibu rumah tangga menghambat keberhasilan kebijakan *Womenomics*. Pada intinya, pembagian kerja ini didasarkan pada pemanfaatan komitmen kuat dari tenaga kerja inti laki-laki dengan pekerjaan yang stabil sambil memanfaatkan tenaga kerja tidak tetap yang semakin banyak terdiri dari pekerja perempuan. Model keluarga yang seperti ini masih terbilang sebagai bentuk keluarga yang “ideal” di masyarakat, dan ini menjadi nilai yang mendasari keputusan politik dan organisasi. Meskipun begitu, Macnaughtan tidak menjelaskan bagaimana skeptisme terhadap kebijakan *Womenomics* ini berkaitan dengan kondisi lingkup kerja yang diskriminatif terhadap perempuan.

Studi tentang kebijakan *Womenomics* yang telah dipaparkan merupakan titik mula bagi peneliti untuk memutuskan melakukan penelitian ini. Tepatnya mengenai bagaimana kebijakan *Womenomics* Shinzo Abe gagal jika dilihat melalui teori feminisme liberal. Pada tulisan ini peneliti ingin menggali lebih dalam elemen-elemen terkait kesetaraan gender, seperti faktor sosial budaya yang mengkonstruksi peran gender, bias gender yang terbentuk di berbagai bidang kehidupan, dan diskriminasi gender terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat Jepang. Elemen-elemen ini akan

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **1.5.2. Teori Feminisme Liberal**

Para akademisi feminis secara terus menerus mengembangkan teori feminis, meninjau ulang teori yang sudah ada, hingga menciptakan gagasan teori yang baru. Pengembangan teori ini merupakan hasil dari gerakan feminisme yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Gerakan feminisme mulai berkecambah pertama kali pada akhir abad ke- 19 hingga awal abad 20. Gerakan ini memperjuangkan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Feminisme gelombang kedua berjuang demi kesetaraan hak dan peluang bagi perempuan sehingga perempuan dapat mengembangkan potensi diri mereka sebagai manusia untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Gerakan feminisme gelombang kedua ini berakar dari pemikiran feminisme liberal. Bagi feminisme liberal, tiap-tiap wanita mendapatkan hak kebebasan memilih selayaknya laki-laki, begitu pula untuk hak-hak individu lainnya. Feminisme liberal berusaha untuk memperluas kesetaraan kepada perempuan berdasarkan pernyataan bahwa perempuan seperti laki-laki adalah individu yang rasional (Ackerly, 2001).

Dalam konteks kontemporer, perjuangan perempuan untuk memiliki kesempatan yang setara, peluang yang setara dalam kehidupan sosial mengalami perluasan definisi. Untuk memahami perluasan definisi feminisme, Cynthia Enloe dalam bukunya yang berjudul “Bananas, Beaches, and Bases” mengajukan satu pertanyaan krusial, “*Where are the*

*women?*” atau dalam arti lain, mempertanyakan di manakah perempuan (berada). Dengan mempertanyakan “Di manakah perempuan?” terdapat determinasi untuk mencari jawaban atas cara kerja dunia ini. Cara kerja dunia saat ini menurut pengamatan Enloe ialah, manusia hidup di dunia yang berbahaya. Dan di dunia yang berbahaya ini, pria biasanya dibayangkan sebagai pelindung alami, sedangkan perempuan dipandang sebagai orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Mereka yang dimasukkan ke dalam kategori dilindungi biasanya dianggap aman "di rumah" dan, dengan demikian, tidak mampu secara realistis menilai bahaya "di luar sana". Apa yang dijelaskan oleh Enloe merupakan gambaran dari stereotip yang diterima secara luas oleh dunia.

Stereotip adalah sekumpulan asosiasi yang dipelajari dengan sangat mendalam antara beberapa karakteristik atau perilaku dan kategori sosial apa pun. Adanya stereotip tentang gender tertentu menimbulkan bias gender secara tidak disadari (Filut, Kaatz & Karners, 2017). Kategori sosial yang menjadi pokok oleh pemikir feminisme adalah gender sebagai identitas; berbeda dengan jenis kelamin sebagai karakteristik biologis seseorang. Dengan memisahkan keduanya, dapat diketahui bagaimana gender dengan kualitas “feminin” maupun “maskulin” merupakan aspek dari perkembangan psikososial, tidak sekadar perbedaan biologis jenis kelamin. Pembagian sosioseksual ini kemudian memungkinkan analisis identitas gender bergerak tepat ke dalam ranah proses sosial dan kelembagaan (Hooper, 2001: 31-32). Tidak hanya itu, pembagian ini juga memberikan

batasan yang jelas mengenai keadaan sosial manusia di mana identitas maskulin dianggap lebih superior daripada identitas feminin. (Stoltenberg, 2004: 41). Oleh karena itu, muncullah stereotip terhadap gender yang diasosiasikan dengan fitur-fitur jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Laki-laki, sebagaimana yang telah dijelaskan Enloe dianggap sebagai sosok pelindung yang “maskulin”, dan kuat. Sementara perempuan dianggap sebagai sosok yang dilindungi, “feminin”, dan lemah. Penerimaan stereotip peran seperti ini tidak hanya membatasi individu dalam kotak-kotak maskulin, atau feminin; perempuan atau laki-laki, namun juga memperumit relasi sosial perempuan dan laki-laki.

Sejak usia dini anak laki-laki dituntut oleh ekspektasi masyarakat untuk menjadi berani, tidak menangis, dan dominan kepada perempuan sedangkan perempuan diekspektasikan menjadi sosok yang lembut dan patuh kepada laki-laki. Stereotip peran gender ini menimbulkan tindakan represif terhadap perempuan yang dianggap sebagai gender yang lebih lemah daripada laki-laki. Akibatnya, tidak mengherankan apabila perempuan lantas menjadi target pernikahan paksa, kekerasan domestik, diskriminasi di lingkup kerja, dan sebagainya. Derita perempuan diabaikan sebab hal tersebut dianggap sebagai hal-hal yang berada dalam ranah ‘privat’ dan tidak berada dalam domain ‘publik’ atau urusan tata negara. Oleh karena itu, feminis berusaha untuk “membangkitkan politik internasional” dengan cara membawa masalah-masalah ‘privat’ ke diskursus publik, dengan tujuan untuk dapat menaikkan masalah ‘privat’ berupa

tindakan represif ke permukaan (Steans & Pettiford, 2009: 347).

## **1.6.Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Bias Gender**

Bias gender menurut Rothchild (2014) adalah perlakuan yang cenderung memfavoritkan satu gender di atas lainnya. Penelitian ini akan menggunakan konsep bias gender dalam pembahasan mengenai kegagalan kebijakan Womenomics Shinzo Abe. Ada tiga aspek kehidupan yang akan dicakup dalam pembahasan ini, yaitu: keluarga, lingkungan kerja, dan politik. Ketiga aspek ini selaras dengan sorotan utama kebijakan Womenomics yang terdiri dari lima target: meningkatkan partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja, normalisasi kurva-M, perluasan kapasitas penitipan anak, peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, dan peningkatan persentase ayah yang bekerja untuk mengambil cuti mengasuh anak dan atau anggota keluarga.

Dari aspek keluarga, bias gender yang berlaku adalah peran gender tradisional di Jepang yang mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan di mana laki-laki berperan sebagai pihak yang memiliki otoritas atas keluarga. Secara historis, pernikahan digunakan sebagai alat agar perempuan melanjutkan garis keturunan, membangun ikatan politik, dan meningkatkan kekayaan keluarga. Sehingga, keluarga di masyarakat Jepang memiliki andil besar dalam penentuan pernikahan. Dengan norma yang seperti ini, perempuan didorong untuk menempati peran yang tunduk dan patuh.

Dorongan ini disertai dengan ekspektasi-ekspektasi sosial seperti untuk memenuhi serangkaian komitmen tersirat, termasuk melahirkan, membesarkan anak, dan perawatan lansia (Villa, 2014). Perlakuan yang meletakkan beban timpang terkait kewajiban rumah tangga dan pengasuhan anak ini tercermin pada penelitian yang dilakukan oleh Belamino dan Roberts (2019). Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan, 7 dari 10 perempuan muda yang diwawancarai menyatakan bahwa ekspektasi keluarga yang diletakkan pada partisipan adalah desakan-desakan seputar pernikahan. Beberapa perempuan yang diwawancarai percaya bahwa kewajiban keluarga terkait dengan pernikahan, sementara 4 partisipan merasa bahwa perempuan diharapkan untuk melakukan tugas-tugas mereka sebagai anak perempuan, 2 partisipan menyatakan bahwa semuanya berpusat pada mendukung atau menghormati laki-laki. Perlakuan yang memberatkan perempuan inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Dalam aspek lingkungan kerja, bias gender mewujud sebagai perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Kumiko Nemoko, seorang pengamat gender Jepang dalam bukunya *“Too Few Women At The Top: The Persistence of Inequality in Japan”* (2016) menjelaskan mengenai bias dalam lingkungan kerja yang masih mengkotak-kotakkan pekerjaan sebagai kualitas feminin atau maskulin. Ideologi bekerja keras untuk kemakmuran ekonomi Jepang diajarkan dan dinormalisasi di sektor-sektor yang membedakan gender. Selama periode pasca perang, loyalitas laki-laki

terhadap pekerjaan dan pemenuhan peran pencari nafkah dipandang sebagai inti dari maskulinitas.

Sedangkan dominasi budaya femininitas ibu rumah tangga di Jepang juga berlaku di tempat kerja, di mana hal ini termanifestasi dalam peran pengasuh, pembantu, serta asisten. Bias gender begitu meluas di Jepang sehingga pemisahan jenis kelamin di tempat kerja sering kali dipandang sebagai hasil dari perbedaan hakikat antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dipandang sebelah mata merupakan prasangka negatif yang masih banyak terjadi di tempat kerja. Menurut survei oleh JTUC (Japanese Trade Union Confederation), 32,8% pencari kerja melaporkan bahwa mereka mengalami prasangka gender selama proses perekrutan. Perempuan umumnya menghadapi kendala dalam tawaran pekerjaan, dengan banyak yang diarahkan ke posisi tingkat yang lebih rendah sementara laki-laki lebih sering dipertimbangkan untuk peran yang memiliki jenjang karier yang lebih tinggi. Perlakuan diskriminatif sebagai bentuk bias gender di tempat kerja seperti ini akan dibahas lebih dalam di penelitian ini.

Dilihat dari aspek politik, adaptasi nilai-nilai tradisional di masyarakat Jepang digunakan sebagai alat pembenaran atas batasan-batasan yang diterapkan kepada perempuan. Konsekuensinya, terdapat batasan-batasan yang terbentuk antara hal-hal yang dianggap “urusan perempuan” dan “urusan laki-laki” atau “urusan privat” dan “urusan publik.” Seperti yang tercermin dari pandangan tradisional Jepang mengenai peran perempuan dan laki-laki tentang keluarga, perihal karir dianggap lebih

pantas oleh ditempati oleh laki-laki. Sedangkan perempuan dianggap memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjalani karir yang setara; perempuan dianggap lebih pantas menekuni pekerjaan rumah tangga saja. Menurut Emma Dalton (2015), perempuan sebagai orang luar di bidang politik memiliki rintangan yang signifikan dalam berbaur ke dalam budaya politik yang maskulin sebagai pihak internal. Artinya, budaya politik maskulin mengekspektasi perempuan untuk memainkan peran pendukung di ranah privat daripada di Dewan, yang penting bagi ranah publik. Perempuan menghadapi hambatan besar untuk memasuki arena politik dalam lingkungan budaya, karena mereka diharapkan untuk terus memenuhi tanggung jawab utama mereka dalam mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Lebih jauh lagi, seksisme yang nyata dan tidak langsung dalam Diet membuat perempuan merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Bias gender seperti ini, terlepas dari perkembangan nilai-nilai kesetaraan gender, masih melekat di masyarakat Jepang.

### **1.6.2. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender, menurut definisi yang dirumuskan oleh UNICEF, adalah konsep bahwa perempuan maupun laki-laki, memiliki kondisi, perlakuan, dan peluang yang sama untuk mewujudkan potensi, hak asasi, dan martabat mereka sepenuhnya, serta untuk berkontribusi pada (dan mendapatkan manfaat dari) pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana kondisi

ekonomi dan social politik Jepang dalam keterkaitannya dengan mewujudkan potensi, hak asasi, dan martabat perempuan maupun laki-laki sepenuhnya. Jepang sendiri memiliki dasar hukum yang mencantumkan perihal membentuk suatu tatanan social yang lebih setara. Tertuang dalam *Basic Act for Gender Equal Society (Act No. 78 of 1999)*, Pembentukan Masyarakat yang Setara Gender (*Formation of a Gender-Equal Society*) didefinisikan sebagai: “membentuk masyarakat di mana laki-laki dan perempuan, sebagai anggota masyarakat yang setara, diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan di bidang apa pun di masyarakat dan dengan demikian sama-sama menikmati manfaat politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta berbagi tanggung jawab.” Peneliti akan menerapkan konsep ini pada kebijakan Womenomics Shinzo Abe, di mana akan ditelusuri lebih mendalam mengenai ketercapaian masyarakat yang setara di Jepang.

### **1.6.3. Stereotip Gender**

Stereotip adalah serangkaian asosiasi yang tertanam kuat antara atribut atau perilaku tertentu dengan kategori sosial apa pun. Stereotip dibentuk oleh interpretasi yang seseorang buat berdasarkan pandangan dunia dan latar belakang budayanya. Stereotip muncul dari interaksi seseorang dengan orang lain, bukan dari sumbernya. Stereotip sering kali terkait dengan sifat-sifat yang dapat diidentifikasi. Ciri-ciri yang diidentifikasi sering kali dipilih tanpa alasan. Ini berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi satu karakteristik dan mengabaikan karakteristik lainnya.

Stereotip adalah generalisasi yang berlaku untuk orang-orang dalam kelompok tertentu. (Saguni, 2014)

Dalam penelitian ini, stereotip akan difokuskan pada stereotip yang berkaitan dengan gender yang berarti keyakinan yang dipegang secara luas tentang karakteristik, perilaku, dan peran laki-laki dan perempuan (Weinraub, dkk., 1984). Penerapan konsep stereotip gender dalam hubungannya dengan kebijakan Womenomics, stereotip yang akan menjadi sorotan penelitian adalah stereotip-stereotip gender yang melingkupi aspek-aspek yang ada di Kebijakan Womenomics.

Misalnya, pada lingkungan kerja. Kendati terdapat perkembangan zaman, perempuan masih terus menghadapi ekspektasi normatif. Ekspektasi ini berasal dari pandangan mendasar atas norma gender yang feminin ialah bahwa perempuan harus bersikap baik dan sopan, serta selalu bersedia membantu orang lain bila diperlukan. Dengan demikian, perilaku kerja yang membutuhkan kasih sayang dan kepedulian lebih cenderung dipandang sebagai “harus” oleh perempuan daripada laki-laki. Akibatnya, diyakini bahwa perempuan harus berpartisipasi dalam tindakan altruistik pada kesempatan apapun. Jika perempuan gagal memenuhi ekspektasi normatif ini, perempuan jadi sering dianggap kurang berkarakter, sementara jika laki-laki yang tidak memenuhi ekspektasi tadi, justru dianggap luar biasa. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa stereotip gender dapat menimbulkan efek negatif terhadap penilaian kinerja, kemungkinan peningkatan karier, dan penghargaan organisasi. Stereotip gender yang memunculkan ekspektasi

normatif sehingga menimbulkan dampak negative bagi perempuan inilah yang akan diulik lebih lanjut dalam penelitian ini.

### **1.7.Argumen Penelitian**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini peneliti memiliki argumen mengenai kegagalan kebijakan Womenomics Shinzo Abe. Peneliti memandang bahwa selama pelaksanaan kebijakan Womenomics, bias gender baik di masyarakat maupun institusi pemerintah masih sangat melekat. Hal ini menghambat progres kesetaraan gender di Jepang. Bias gender memunculkan stereotip negatif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang, diantaranya adalah: rumah tangga, lingkup kerja, dan politik.

### **1.8.Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut J.R. Raco (2010: 26) untuk mengetahui bagaimana orang membuat pilihan dan bertindak dalam masyarakat, nilai-nilai masyarakat dan organisasi dihasilkan dan diajarkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Metode ini menekankan pentingnya arti pengalaman manusia dan pengalaman manusia sebagai bahan ilmiah yang dapat dianalisis. Gejala, fakta dan realita dipandang secara keseluruhan bukan secara terpisah-pisah. Suatu gejala yang terjadi saling berkaitan dengan berbagai hal lainnya. Baik tempat gejala itu terjadi, budaya, kebiasaan, situasi politik, ataupun ekonomi. Penelitian kualitatif menggunakan pola sirkular, berulang-ulang, membandingkan hingga menemukan jawaban yang shahih atas apa yang ditelitinya melalui fakta-fakta lapangan, dokumen, wawancara dan berbagai sumber lain yang cukup kompleks sesuai fokus penelitian yang dikaji (Pradoko, 2017: 20).

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Seperti yang telah tertera dalam perumusan masalah, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan alasan mengapa suatu fenomena terjadi. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan berusaha menjelaskan alasan masih terjadinya kesenjangan gender di Jepang.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek yang akan menjadi sumber informasi dari penelitian ini adanya di antara lain adalah pihak-pihak terkait yang dapat memberikan kontribusi substansi dalam topik kesetaraan gender di Jepang.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti metode penelitian yang digunakan, metode kualitatif. Maka, dalam mendukung argumen yang dibuat peneliti untuk menjelaskan fenomena, data-data berbentuk teks, tulisan, frasa atau simbol yang merepresentasikan orang, sikap dan tindakan aktor yang terlibat akan digunakan.

### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat dan atau gambar. Sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang artinya data tidak didapat langsung dari sumber utama melainkan melalui perantara seperti media

massa, situs pemerintah, buku, jurnal daring, artikel di internet, kabar berita, film dokumenter, dokumentasi kongres, dan sebagainya.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian kualitatif yang dikumpulkan adalah data sekunder, artinya data didapat bukan dari sumber secara langsung melainkan melalui perantara. Seperti media, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen pemerintahan, ataupun buku referensi. Pengumpulan data metode kualitatif menuntut keahlian, keterampilan dan pengetahuan peneliti. Dengan kata lain, data harus dijalankan dengan sistematis dan tekun agar dapat melakukan analisis secara komprehensif (Jaco, 2010: 56).

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini akan menggunakan interpretasi data fenomenologi, di mana peneliti akan mendeskripsikan fenomena kesenjangan gender di Jepang dalam studi kasus kebijakan Womenomics Shinzo Abe dengan menggunakan teori feminisme sebagai pisau analisis. Dengan menelusuri latar belakang masalah, peneliti hendak memberikan gambaran tentang kesenjangan gender di Jepang. Maka, untuk menganalisis isu-isu tersebut, perlu digunakan konsep-konsep feminisme yang meliputi kesetaraan peluang, sosialisasi gender, dan anti diskriminasi. Konsep-konsep ini akan digunakan dalam menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan fenomena kesenjangan gender di Jepang.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Penelitian ini akan berfokus membahas peran gender di Jepang dengan memperhatikan konteks historis mengenai bagaimana nilai-nilai seksis masih merajalela dalam masyarakat yang mengakibatkan diskriminasi berbasis gender. Selain itu penelitian ini juga akan menelusuri dinamika isu gender yang terjadi dalam kontemporer Jepang.